

**PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK**

M. Kendry Widiyanto

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
kenronggo@untag-sby.ac.id

Adi Susiantoro

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
adi_susiantoro@untag-sby.ac.id

V. Rudy Handoko

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
rudy@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Saat ini desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintahan desa di berbagai tempat adalah kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi dan peningkatan kualitas pelayanan akibat kurangnya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat berkontribusi dalam mengatasi persoalan tersebut melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan maupun penyelenggaraan FGD (*focus group discussion*). Beberapa desa di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk juga menghadapi persoalan tersebut. Persoalan yang dihadapi oleh perangkat desa di desa Talun dan desa Jintel dalam memberikan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan berkisar pada faktor: fasilitas SIAK, selesainya proses pelayanan tidak tepat waktu dan kurangnya sosialisasi perubahan data kependudukan. Penataan ruang tunggu dalam pelayanan publik relatif sederhana dan perangkat desa masih lamban dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan serta tidak adanya kotak saran dan papan pengumuman belum tersedia secara teratur serta belum memadai termasuk S.O.P Pelayanan Publik. Keinginan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terkendala oleh kurangnya kompetensi SDM dalam memenuhi tuntutan tugas pekerjaan. Oleh karenanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945

(Untag) Surabaya ikut serta memberikan bantuan berupa penyuluhan dan pendampingan guna peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa melalui program Pengabdian Masyarakat. Sebagai langkah pertama dilakukan kegiatan FGD untuk memetakan persoalan yang dihadapi dalam upaya mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan terhadap perangkat desa sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Kata Kunci: *Penyuluhan dan Pendampingan, Peningkatan Kualitas , Pemerintahan Desa*

A. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat (abdimas) merupakan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi sebagai bentuk sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk kegiatan abdimas yang dapat dilakukan antara lain: pelatihan, pendampingan, dan penyelenggaraan *focus group discussion (FGD)* untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi di masyarakat.

Saat ini desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintahan desa di berbagai tempat adalah kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi dan meningkatkan kualitas pelayanan akibat rendahnya kompetensi SDM yang dimiliki. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat berkontribusi dalam mengatasi persoalan tersebut melalui penyelenggaraan FGD, bantuan pelatihan, dan pendampingan.

Desa Talun dan Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu desa yang menghadapi persoalan tersebut. Keinginan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terkendala oleh kurangnya kompetensi SDM dalam memenuhi tuntutan tugas pekerjaan. Oleh karenanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Untag Surabaya berinisiatif memberikan bantuan pendampingan melalui program abdimas. Sebagai langkah pertama dilakukan kegiatan FGD untuk memetakan persoalan yang dihadapi dalam upaya mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan terhadap perangkat desa sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Saat ini desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintahan desa di berbagai tempat adalah kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi dan jaringan dalam meningkatkan kualitas pelayanan akibat kurangnya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat berkontribusi dalam mengatasi persoalan tersebut melalui

penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan maupun penyelenggaraan FGD. Bagaimana kompetensi SDM perangkat desa Talun dan desa Jintel di bidang pelayanan publik, dan bagaimana kualitas pelayanan administrasi di desa Talun dan desa Jintel.

Kegiatan ini dilakukan dengan target dan luaran sebagai berikut: diharapkan dari kegiatan penyuluhan dan pendampingan ini akan dapat memfasilitasi terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen FISIP Untag Surabaya; memberikan pengalaman dan meningkatkan kompetensi bagi dosen dalam menggali, memetakan, dan mencari solusi tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan desa dalam menjalankan pelayanan masyarakat/publik; memperoleh bahan studi kasus bagi dosen untuk pengembangan materi perkuliahan di kelas; membantu pemerintahan desa-desa di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Ngajuk dalam menemukan akar persoalan yang dihadapi dalam pelayanan publik, sekaligus mencarikan solusinya; meningkatkan kualitas kompetensi SDM perangkat desa-desa di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan tugas pelayanan publik; mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa-desa di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi desa. Sedangkan luarannya adalah: “Tersedianya Buku Panduan Pelayanan Publik bagi Perangkat Desa”.

B. METODE PELAKSANAAN

1. **Nama kegiatan:** Penyuluhan dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Talun dan Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
2. **Tanggal Kegiatan:** Pelaksanaan ABDIMAS dan Pendampingan dilakukan pada 14 – 16 Juli 2020.
3. **Tempat Kegiatan:** Desa Talun dan Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Kediri.
4. **Tim Pendamping terdiri dari:** Drs. M. Kendry Widiyanyto, M.Si; Drs Adi Susiantoro, M.Si; dan Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS
5. **Bidang Kegiatan:** Pelayanan Publik
6. **Agenda Kegiatan:**
 - Hari Pertama:* 14 Juli 2020 Survei lokasi dan diskusi dengan Kepala Desa tentang gambaran umum desa-desa di wilayah Kecamatan Rejoso dan problematikanya.
 - Hari Ke dua:* 15 Juli 2020.

Jam	Kegiatan	Keterangan
04.00 – 07.00	Sholat Subuh dan persiapan acara Abdimas	Tempat : Kantor
07.00 – 08.00	Makan pagi	
08.00 – 08.30	Perjalanan menuju Pendopo Kec. Rejoso	

08.30 – 09.00	Persiapan acara pembukaan Abdimas	Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
09.00 – 09.45	Acara pembukaan Abdimas	
09.45 – 10.00	Coffee Break	
10.00 – 12.00	Kegiatan wawancara Abdimas	
12.00 – 13.30	Ishoma	
13.30 – 14.30	Lanjutan wawancara Abdimas	

Hari Ke Ketiga: 16 Juli 2020

08.00 – 09.30	Kegiatan wawancara Abdimas	Tempat : Kantor Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
09.30 – 09.45	Coffee Break	
09.45 – 11.00	Lanjutan wawancara Abdimas	
11.00 – 12.00	Lanjutan pendampingan minggu 1	
12.00 – 13.00	Ishoma	
13.00 – 14.00	Lanjutan pendampingan	
14.00 – 14.30	Acara penutupan Abdimas + Pendampingan	
14.30 – 15.30	Salaman dengan Perangkat Kecamatan dan Desa lalu dilanjutkan perjalanan kembali ke Surabaya	

- 7. Peserta:** Peserta kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa .adalah perangkat desa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Publik yang terdiri dari: 2 orang Staf Kantor Desa, yaitu bapak Hadi IsmailKasi Pelayanan Desa Talun dan bapak Gunadi Kasun di Desa Jintel Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yang berkaitan dengan masalah Pemanfaatan jaringan komputer dan wifi yang harus dimiliki oleh Desa.

C. HASIL YANG DICAPAI

Berdasarkan hasil wawancara, dialog dan diskusi Tim Penyuluhan dan Pendampingan dengan Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, dan Kepala

Dusun Desa Talun dan Desa Jintel Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Profil masyarakat di desa Talun dan desa Jintel Kecamatan Rejoso.

Sebagaimana masyarakat desa pada umumnya, kehidupan sebagian masyarakat di kedua desa tersebut juga dari sektor pertanian. Akan tetapi, ada yang membedakan dengan desa pada umumnya, yaitu bahwa di kedua desa dan wilayah sekitarnya juga berkembang sektor industri, sehingga sebagian masyarakatnya ada yang berprofesi sebagai petani, sebagian lagi ada yang berprofesi sebagai pekerja/karyawan pabrik maupun pegawai pemerintah.

Demikian pula dengan berkembangnya sektor industri di kedua desa tersebut berkembang pula kelompok-kelompok hunian yang berbentuk perumahan, yang pada umumnya ditinggali oleh masyarakat yang bukan petani, dan banyak pula diantara mereka yang bekerja di wilayah lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan tempat tinggalnya. Dengan berkembangnya sektor industri di kedua desa tersebut dan sekitarnya berpengaruh pula terhadap kehidupan masyarakatnya. Banyaknya para pendatang di kedua desa tersebut berdampak pula dengan ditinggalkannya kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dulu pernah berkembang di masyarakat. Disisi lain, dengan berkembangnya sektor industri di wilayah tersebut juga berpengaruh terhadap percepatan peningkatan pendidikan masyarakatnya. Sehingga kalau ditinjau dari pendidikannya, di kedua desa tersebut sudah banyak masyarakat yang berpendidikan SLTA, bahkan sarjana. Tingkat pendidikan masyarakat akan berpengaruh pada sikap masyarakat terhadap program-program pemerintah.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat terlaksana. Oleh sebab itu diperlukan wadah yang bisa menampung aspirasi masyarakat yang dapat menjembatani berbagai keluhan antara masyarakat dengan pemerintah. Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Talun maupun Desa Jintel bisa dilihat dari kompetensi SDM dalam memberikan pelayanan publik masih terjadi kurang cepatnya dalam memberikan pelayanan.

2. Penyuluhan dan Pendampingan

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang seharusnya diperuntukkan bagi penanggungjawab dan petugas dalam pelayanan publik di Desa Talun maupun Desa Jintel hanya dihadiri oleh 2 orang staf administrasi, 1 orang staf Kantor Desa Talun dan 1 orang dari Desa Jintel.

Berdasarkan hasil FGD dengan peserta penyuluhan dan pendampingan diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: a. Perangkat Desa Talun maupun Desa Jintel telah melaksanakan kegiatan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya; b. Fakta dan kegiatan yang selama ini telah dilakukan antara lain yaitu bersama Kepala Desa, ikut memberikan pelayanan publik khususnya dalam administrasi kependudukan bagi masyarakat Desa Talun maupun Desa Jintel; c. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan yang berkaitan dengan pelayanan publik kepada masyarakat antara lain: 1) Membangun komunikasi dengan perangkat desa yang berperan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat; 2) Berusaha secara intensif memberikan masukan-masukan kepada Kepala Desa yang berkaitan dengan kondisi desa; 3) Ikut serta dalam penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana

desa, antara lain ikut serta dalam penyediaan peralatan yang berhubungan dengan pekerjaan administrasi kependudukan; d. Pengelolaan pelayanan publik di Desa Talun maupun Desa Jintel, berdasarkan hasil wawancara, relatif berjalan. Tim FISIP UNTAG Surabaya telah menganjurkan untuk pelaksanaan pelayanan publik di Desa Talun maupun Desa Jintel bisa ditingkatkan.

3 Kendala dan Masalah yang Dihadapi

- a. Desa Talun : relatif mengalami masalah dalam SIAK yang berkaitan dengan data kependudukan di desa maupun dari Kabupaten Nganjuk.
- b. Desa Jintel : relatif mengalami masalah dalam SIAK yang berkaitan dengan data kependudukan di desa maupun dari Kabupaten Nganjuk.
- c. Desa Talun : dalam penataan ruang tunggu dalam pelayanan publik relatif sederhana dan perangkat desa masih lamban dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan serta tidak adanya kotak saran dan papan pengumuman yang relatif kurang baik termasuk S.O.P Pelayanan Publik.
- d. Desa Jintel: Dalam penataan ruang tunggu dalam pelayanan publik relatif sederhana dan perangkat desa masih lamban dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan (tidak tepat waktu) serta tidak adanya kotak saran dan papan pengumuman belum tersedia secara teratur termasuk S.O.P Pelayanan Publik.

Oleh karena itu dengan adanya Penyuluhan dari Tim FISIP UNTAG Surabaya kepada peserta penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan secara interaktif/dialog sangat diperlukan, dimana perangkat desa Talun maupun desa Jintel, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk mengemukakan masalah dan Tim Penyuluhan Pelayanan Publik FISIP UNTAG Surabaya berusaha memberikan solusi pemecahan masalah yang ada di kedua desa tersebut.

D. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan dan pendampingan kepada perangkat desa untuk tujuan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintah desa Talun dan desa Jintel menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat kesesuaian antara kegiatan yang dijalankan oleh perangkat desa dengan tupoksinya. Beberapa kegiatan yang bersifat bantuan kepada perangkat lain semata-mata untuk menjamin kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Jam kerja pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan di Kantor Desa adalah 08.00-12.00 WIB. Untuk keperluan yang mendesak pelayanan publik dapat dilakukan di luar jam tersebut berdasarkan perjanjian atau silaturahmi yang sudah berjalan dengan baik di kedua desa tersebut.
3. Persoalan yang dihadapi oleh perangkat desa di desa Talun dan desa Jintel dalam memberikan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan berkisar pada faktor: fasilitas SIAK, kurangnya sosialisasi perubahan data kependudukan.
4. Penataan ruang tunggu dalam pelayanan publik relatif sederhana dan perangkat desa masih lamban dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan serta tidak adanya kotak saran dan papan pengumuman belum tersedia secara teratur serta belum memadai termasuk S.O.P Pelayanan Publik.

5. Kegiatan abdimas ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak.
 - a. Bagi FISIP dan Untag Surabaya, kegiatan ini menanamkan citra positif lembaga di mata perangkat desa Talun dan desa Jintel yang diharapkan akan berdampak simultan pada masyarakat setempat.
 - b. Bagi perangkat desa Talun dan desa Jintel, kegiatan ini memberikan solusi dalam pemecahan persoalan yang dihadapi.
 - c. Bagi masyarakat Desa di desa Talun dan desa Jintel, kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya bidang administrasi kependudukan.

Untuk pelaksanaan pelayanan publik khususnya dalam bidang administrasi kependudukan hendaknya ditingkatkan misalnya dengan menerapkan teknologi, agar pelayanan menjadi semakin meningkat dan penataan ruang tunggu yang lebih baik serta papan pengumuman yang besar dan tersedianya kotak saran serta disediakan buku bacaan atau koran dan bila perlu ada televisi sehingga masyarakat yang menunggu dalam proses pelayanan publik tidak merasakan kalau yang bersangkutan sedang menunggu proses pelayanan publik khususnya administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia (2014) Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Sekretarian Negara Negara Republik Indonesia, Jakarta.

Riyanto (2009). Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Desktop dan Web, Gava Media, Yogyakarta

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2014), Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.

Arif Darmawan,(2015), Modernisasi Masyarakat Desa .LP2i Press Surabaya , Isbn 978-602-1056-02-6